BIRO LOGISTIK POLDA RIAU

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET PEKERJAAN :

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG RPK POLRESTA PEKANBARU TYPE 300, 2 LANTAI T.A. 2023

LOKASI :

KOTA PEKANBARU

SUMBER DANA :

DIPA RKA-KL BIRO LOGISTIK POLDA RIAU T.A. 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
BIRO LOGISTIK

URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG RPK POLRESTA PEKANBARU TYPE 300, 2 LANTAI T.A. 2023

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tertib administrasinya;

2. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi pemberi jasa/ layanan pengawasan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan personel yang berkompetensi sebagai tenaga kerja konstruksi dibidangnya sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan;

3. Penyedia Jasa Konsultan pengawasan konstruksi bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari segi masukan, proses dan produk kegiatan;

4. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultan pengawasan konstruksi meliputi:
    1. Pengawasan persiapan konstruksi;
    2. Pengawasan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);

3. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi; dan
4. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir *(Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi.

B. Latar Belakang

1. Pemegang mata anggaran adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Riau;
2. Pekerjaan yang akan dilakukan merupakan bagian lingkup Biro Logistik Polda Riau.

C. Referensi Hukum

Referensi hukum dalam Pelaksanaan proses kegiatan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahannya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultan Konstruksi;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 524/PRT/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultan

Konstruksi;

11. SNI yang berlaku yang mengatur tentang Pelaksanaan Konstruksi;
12. Peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Gedung RPK Polresta Pekanbaru Type 300, 2 Lantai T.A. 2023 untuk meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Polri.

III. SASARAN

Yang menjadi target/ sasaran dalam pekerjaan pengawasan konstruksi ini adalah

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu;
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
4. Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara yang tertib, efektif dan efisien.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Pengguna Jasa Adalah: Biro Logistik Polda Riau

Alamat : Jl. Pattimura,13 – Pekanbaru

A. Sumber Dana

Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Konstruksi ini disediakan dana dengan nilai pagu sebesar **Rp. 109.770.000,- (Seratus Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).** sumber dana melalui pembiayaan DIPA RKA-KL BIRO LOGISTIK POLDA RIAU T.A. 2023.

V. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN INFORMASI

A. Lingkup kegiatan**:Pengawasan Pembangunan Gedung Rpk Polresta Pekanbaru Type 300, 2 Lantai T.A. 2023**

B. Lokasi kegiatan **: Kota Pekanbaru**

C. Data dan informasi **:**

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini;

2. Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri, kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi;
3. Informasi pengawasan antara lain:
   a. Dokumen pelaksanaan yaitu:
      1) Rincian Anggaran Biaya;
      2) Gambar-gambar pelaksanaan;
      3) Spesifikasi Teknis/ Rencana kerja dan syarat-syarat;
      4) Dokumen kontrak Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi.
   b. Bar chart dan s-curve serta network planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi (setelah disetujui);
   c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Konstruksi;
   d. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk Pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu Pekerjaan; dll
   e. Informasi lainnya.
4. Program alih teknologi;
5. Staf/tim teknis pelaksanaan Pekerjaan.

   Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Konstruksi diperkirakan selama **4 (Empat) bulan** atau **120 (Seratus dua puluh) hari kalender/** mengikuti selama pekerjaan konstruksi berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK;
2. Melaksanakan Pengawasan dalam Masa Pemeliharaan pekerjaan Konstruksi Selama **6 (Enam) Bulan** atau **180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender/** Mengikuti masa pemeliharaan pekerjaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Kedua/akhir/ *Final Hand Over* (FHO).

Demikianlah Uraian Singkat pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2023

MENGETAHUI:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO LOGISTIK POLDA RIAU	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO LOGISTIK POLDA RIAU
MUNGGARAN KARTAYUGA, S.I.K KOMBES POL NRP 75050529	IISNO SAPUTRA, S.H., M.H BRIGADIR NRP 96040437